

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
PELAKSANAAN AKUNTANSI LINGKUNGAN
(Studi pada KLH/BLH, Dinkeb, dan PDAM
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**TAUFIQ BAGUS PRASOJO
NIM C2C008231**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Taufiq Bagus Prasajo
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008231
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMENGARUHI PELAKSANAAN
AKUNTANSI LINGKUNGAN DI
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dosen Pembimbing : Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 15 Oktober 2012

Dosen Pembimbing,

Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt.
NIP 196808271992021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Taufiq Bagus Prasajo
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008231
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMENGARUHI PELAKSANAAN
AKUNTANSI LINGKUNGAN (Studi pada
KLH/BLH, Dinkeb, dan PDAM
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 Oktober 2012

Tim Penguji:

1. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Prof., Dr., Abdul Rohman, M.Si., Akt. (.....)
3. Drs., Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Taufiq Bagus Prasajo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan (Studi pada KLH/BLH, Dinkeb, dan PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau penulisan dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Oktober 2012

Yang membuat pernyataan,

Taufiq Bagus Prasajo

NIM C2C008203

ABSTRACT

The objectives of this research is to analyze the influence of organization size, accounting regulation, and environmental management on environmental accounting practices. The samples used here are primary data from badan lingkungan hidup (BLH)/kantor lingkungan hidup (KLH), dinas kebersihan (Dinkeb), and perusahaan daerah air minum (PDAM) level regency. Data was collected by sent questionnaire directly to every responden. The sample collected were 17 KLH/BLH, 3 Dinkeb, and 13 PDAM.

This research uses linear regression analysis to examine the hypothesis. Hypotheses examined by F test and t test. The results showed that organization size is not significant to influence environmental accounting practices, accounting regulation is significant positively to influence environmental accounting practices, and environmental management is not significant to influence environmental accounting practices.

Keywords: Organization Size, Standard Accounting Expression, Environmental Management, Environmental Accounting Practices

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran organisasi, pernyataan standar akuntansi, dan manajemen lingkungan terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan. Sampel yang digunakan adalah data primer yang berasal dari badan lingkungan hidup (BLH)/kantor lingkungan hidup (KLH), dinas kebersihan (Dinkeb), dan perusahaan daerah air minum (PDAM) tingkat kabupaten/kota. Data dikumpulkan dengan mengirim kuesioner secara langsung ke tiap responden. Total sampel yang terkumpul adalah 17 KLH/BLH, 3 Dinkeb, dan 13 PDAM.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear untuk menguji hipotesis. Hipotesis-hipotesis diuji dengan uji F dan uji t. Hasil uji regresi yaitu ukuran organisasi tidak signifikan memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan, pernyataan standar akuntansi signifikan secara positif dalam memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan, dan manajemen lingkungan tidak signifikan memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan.

Kata Kunci: Ukuran Organisasi, Pernyataan Standar Akuntansi, Manajemen Lingkungan, Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bermimpilah. Tuhan akan memeluk mimpimu”
(Arai, tokoh dalam novel “Sang Pemimpi”. Peraih beasiswa S2 di Universitas Sorbonne, Prancis)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(QS 94: 5 & 6)

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil”
(Ahmad Fuadi, penulis novel “Negeri 5 Menara”)

“Nikmati dan syukurilah masa-masa sulitmu saat dalam usaha meraih mimpi”
(Taufiq Bagus Prasajo/Afiq)

Untuk almarhum kakekku Seto,
ayahku Bambang Sugito, ibuku Erna Bahariyanti,
dan Indonesia-ku, Zamrud Khatulistiwa

KATA PENGANTAR

Puji syukur ditujukan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi “**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan (Studi pada KLH/BLH, Dinkeb, dan PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)**”. Skripsi disusun untuk menyelesaikan Program studi sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari, skripsi ini terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Drs H Mohammad Nasir MSi PhD Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Dr H Agus Purwanto Msi Akt selaku dosen pembimbing. Terima kasih membimbing saya dengan sabar dan memotivasi saya agar lekas menyelesaikan skripsi ini
3. Herry Laksito SE Madv Acc Akt selaku dosen wali. Terima kasih atas bimbinganmu selama saya kuliah
4. Prof Dr H Muchamad Syafruddin Msi Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Terima kasih berkenan menjadi dosen pembimbing skripsi informal saya
5. Prof Dr H Abdul Rohman Msi Akt dan Prof Drs H Arifin Sabeni Mcom (Hons) PhD Akt. Terima kasih telah memberi saran terhadap skripsi saya
6. Para dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bermanfaat
7. Para staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
8. Almarhum kakekku Seto. Terima kasih sudah mendidik cucumu menanam dan merawat pohon ☺ Nenekku Sri Kastun, terima kasih atas kasih sayangmu ☺
9. Kedua orang tuaku, Bambang Sugito dan Erna Bahariyanti yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan memotivasi ☺

10. Adikku yang ayu Ratih Putri Nastiti. Makasi, mas *udah di-pinjemin* modem buat cari referensi untuk *nyusun* skripsi ☺
11. Mama, Papa, Bang Bos, mbak Agnes, mbak Ang, mas Hadi, dek Ayu, dek Otam, dek Nidar, mas Kiki, Mak Nyak. Inspirator untuk tidak menyerah mengejar mimpi ☺
12. Terima kasih Eyang Uti Semarang, Budhe Tatik, Pakdhe Bambang, Budhe Retno, Pakdhe Agus, Budhe Yani, mas Uung (Dimas) yang *udah* sabar menghadapi cucu/keponakan/adik iparmu yang bandel ini
13. *Dream Team*: Gagat, Agus (Genjus) & Tio. Selama kuliah, banyak kenangan seru yang aku lewati bareng kalian
14. Nurul Huda yang *udah nemenin* ke *Gubernuran* buat minta kata pengantar dari pak Gubernur Bibit Waluyo
15. Terima kasih sahabat perantauan selama mengirim kuesioner ke 22 kab/kota prov Jateng: Dwi Nastiti, Nuha, Dedi “Geo” Setiono, Andi *cah* Tegal, Surya Balitar, Fajar Kustriantomo, Mas Fikri (Karanganyar), Rudra Dwi Syailendra, dek Ganesha, kel pak Suprawata & pak Imbuh (desa KKN) ☺
16. Teman-teman Akuntansi 2008, terutama Kelas A Reguler II yang selalu membantu, mendoakan, dan memberi semangat. Suka duka semasa kuliah kita alami bersama, semoga Allah SWT selalu memberkahi persahabatan kita. Amin ☺
17. Teman-teman KKN Kec Selopampang, Kab Temanggung, terutama Desa Bumiayu. Saling memberi semangat & inspirasi semasa KKN hingga kini ☺
18. Teman-teman LPM Manunggal & BAPSI Undip, anggota keluarga baru ☺
19. Kepada segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang ikut membantu kelancaran pembuatan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kelestarian lingkungan nusa dan bangsa.

Semarang, 15 Oktober 2012

Penulis,
Taufiq Bagus Prasajo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Penelitian	3
1.3.2 Kegunaan Penelitian	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Sistem dan Pertanggungjawaban Sosial	6
2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	7
2.1.3 Teori Legitimasi	8
2.1.4 Pengertian Akuntansi	9
2.1.5 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	9
2.1.6 Pengertian Akuntansi Lingkungan	10
2.1.7 Aspek-Aspek Akuntansi Lingkungan	11
2.1.8 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan	

Akuntansi Lingkungan	11
2.1.9 Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan (<i>Environmental Accounting Practices/EAPI</i>)	13
2.2 Penelitian Terdahulu	14
2.3 Kerangka Pemikiran	17
2.4 Hipotesis	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	23
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
3.5 Metode Analisis	39
3.5.1 Uji Validitas	40
3.5.2 Uji Reliabilitas	40
3.5.3 Analisis Statistik Deskriptif	41
3.5.4 Uji Asumsi Klasik	41
3.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda	43
3.5.6 Koefisien Determinasi (R^2)	44
3.5.7 Pengujian Hipotesis	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	46
4.2 Analisis Data	47
4.2.1 Hasil Uji Validitas	47
4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas	51
4.2.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	53
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	58
4.2.5 Hasil Uji ANOVA	60
4.2.6 Hasil Uji Regresi	60
4.2.7 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	62
4.3 Interpretasi Hasil	62

4.3.1 Pengaruh Ukuran Organisasi Terhadap Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan	62
4.3.2 Pengaruh Peraturan Akuntansi Terhadap Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan	64
4.3.3 Pengaruh Manajemen Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan	65
BAB V PENUTUP	67
5.1 Simpulan	67
5.2 Keterbatasan	68
5.3 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ukuran Organisasi	25
Tabel 3.2 Peraturan Akuntansi BLH & KLH	26
Tabel 3.3 Peraturan Akuntansi PDAM	27
Tabel 3.4 Manajemen Lingkungan BLH & KLH	29
Tabel 3.5 Manajemen Lingkungan PDAM	30
Tabel 3.6 Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan BLH & KLH	33
Tabel 3.7 Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan PDAM	36
Tabel 3.8 Ringkasan Variabel Penelitian	38
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Ukuran Organisasi (UK)	47
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Ukuran Organisasi (PA)	47
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Manajemen Lingkungan (ML)	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan (PAL)	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Ukuran Organisasi (UK)	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Ukuran Organisasi (PA)	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Manajemen Lingkungan (ML)	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan (PAL)	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian di BLH/KLH, Dinas Kebersihan	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian di PDAM	53
Tabel 4.11 Hasil Analisis Statistik Deskriptif BLH/KLH, Dinas Kebersihan	54
Tabel 4.12 Hasil Analisis Statistik Deskriptif PDAM	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Asumsi Klasik	58
Tabel 4.14 Hasil Uji ANOVA	60
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi	61
Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	20
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas	59
Gambar 4.2 Uji Normalitas	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Kuesioner BLH/KLH dan Dinkeb	75
Lampiran B Kuesioner PDAM	83
Lampiran C Rincian Responden	90
Lampiran D Tabulasi Data	91
Lampiran E Hasil Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Statistik Deskriptif	95
Lampiran F Hasil Regresi	106

BAB I

PENDAHULUAN

Di bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1). Dari penjelasan definisi lingkungan hidup di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup memengaruhi kesejahteraan umat manusia dan makhluk hidup lain. “Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia,” Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup RI tahun 1973-1993.

Lingkungan hidup dapat memengaruhi kehidupan manusia karena memiliki daya dukung. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan daya dukung lingkungan hidup. Definisi daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain (UU Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 5).

Karena lingkungan hidup Indonesia menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia, maka pemerintah harus melaksanakan tindakan

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 3). Namun, pemerintah Jawa Tengah terkesan belum melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan dengan sungguh-sungguh. Sebab, menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar (2004-2009), pada tahun 2007 daya dukung lingkungan Pulau Jawa dengan penduduk terpadat di Indonesia terus menyusut. Bencana alam yang melanda kawasan Jawa Tengah menjadi sinyal akutnya kerusakan ekosistem (Pernyataan Rachmat Witoelar dalam website: www.arthagrahapeduli.org).

Alasan akuntansi lingkungan di pemerintahan dan BUMD penting diteliti adalah: meskipun lingkungan hidup di Jawa Tengah kian terdegradasi, penelitian terhadap kegiatan pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan badan usaha milik daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam melestarikan lingkungan, khususnya di bidang akuntansi lingkungan masih jarang dilakukan. Selain itu, Ribeiro dan Monteiro, 2009, juga menuturkan masih terjadi kekurangan hasil penelitian yang meneliti akuntansi lingkungan pada sektor publik.

Jika masih terjadi kekurangan hasil penelitian, maka pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha milik daerah kabupaten/kota tidak dapat mengetahui kinerja lingkungannya. Selain itu, pemerintah provinsi serta masyarakat umum tidak dapat mengevaluasi kinerja lingkungan mereka. Padahal, pelaksanaan akuntansi lingkungan dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus meneliti bidang akuntansi lingkungan sektor pemerintahan. Penulis ingin meneliti faktor-faktor yang

berpotensi memengaruhi pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha milik daerah kabupaten/kota untuk menerapkan akuntansi lingkungan dalam kegiatan kerjanya. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis mengajukan judul skripsi “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan (Studi pada KLH/BLH, Dinkeb, dan PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

- 1. Apakah faktor ukuran organisasi (jumlah aset dan pegawai) berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan di instansi daerah dan badan usaha daerah?*
- 2. Apakah faktor pernyataan standar akuntansi berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan di instansi daerah dan badan usaha daerah?*
- 3. Apakah faktor manajemen lingkungan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan di instansi daerah dan badan usaha daerah?*

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. *Menganalisis pengaruh faktor ukuran organisasi terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan di instansi daerah dan badan usaha daerah.*
2. *Menganalisis pengaruh faktor pernyataan standar akuntansi terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan di instansi daerah dan badan usaha daerah.*
3. *Menganalisis pengaruh faktor manajemen lingkungan terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan di instansi daerah dan badan usaha daerah.*

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, dan masyarakat umum: 1. faktor ukuran organisasi berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan di instansi daerah dan badan usaha daerah atau tidak; 2. Faktor pernyataan standar akuntansi berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan di instansi daerah dan badan usaha daerah atau tidak; 3. Faktor manajemen lingkungan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan di instansi daerah dan badan usaha daerah atau tidak.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan berisi tentang latar belakang yang merupakan landasan pemikiran penelitian. Latar belakang berisi teori serta fakta

yang mendukung landasan pemikiran penelitian. Selain itu, di dalam bab pendahuluan juga terdapat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab selanjutnya, bab tinjauan pustaka, terdiri dari subbab landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis. Bab ketiga, yakni bab metode penelitian, berisi subbab variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Bab keempat, bab hasil dan analisis, tersusun dari subbab deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil. Bab terakhir, bab kelima, terdiri dari subbab simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran penulis. Setelah bab penutup, terdapat bagian akhir penelitian, yaitu daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Di bab ini akan dijelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sistem dan Pertanggungjawaban Sosial

Teori-teori yang berorientasi sistem seperti teori pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan teori legitimasi, menyatakan bahwa individu, organisasi, instansi pemerintah, atau perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha akan berinteraksi dengan banyak pihak. Teori sistem menekankan bahwa hak atas kepentingan individu atau organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan politik di mana mereka berinteraksi. Kegiatan usaha organisasi juga berdampak terhadap masyarakat. Sehingga, organisasi akan berusaha untuk beroperasi sesuai norma-norma yang ada di masyarakat (Rochmi, 2007).

Penelitian ini juga mendalami pengaruh politik terhadap hak atas kepentingan individu yang dijelaskan pada “Teori Sistem dan Pertanggungjawaban Sosial”. www.dpr.go.id menjelaskan, rancangan undang-undang akan sah menjadi undang-undang jika disetujui oleh pihak legislatif.

Dapat disimpulkan, pihak legislatif yang berasal dari ranah politik sangat memengaruhi penciptaan undang-undang.

2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Cahyono dalam Januarti dan Apriyanti (2005) berpendapat, teori pemangku kepentingan mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Dalam pendekatan tentang perusahaan, pemangku kepentingan adalah pemegang saham, investor, pekerja, pemasok, dan konsumen. Namun seiring perkembangan zaman, interaksi individu atau organisasi kian kompleks. Sehingga pemangku kepentingan makin bertambah, yaitu pemerintah, kelompok politik, asosiasi perdagangan, masyarakat umum, pekerja prospektif, pelanggan prospektif, bahkan pesaing pun termasuk pemangku kepentingan (Rochmi, 2007).

Menurut Januarti dan Apriyanti (2005), ada beberapa alasan yang mendorong instansi atau perusahaan untuk perlu memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, yaitu:

1. Isu lingkungan memengaruhi kepentingan berbagai kelompok
2. Era globalisasi telah mendorong para produsen untuk menciptakan produk ramah lingkungan
3. Para investor cenderung lebih memilih menanamkan modalnya ke perusahaan yang peduli lingkungan

4. LSM dan pencinta lingkungan semakin kritis mengkritik kinerja lingkungan instansi dan perusahaan

2.1.3 Teori Legitimasi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008), kata “legitimasi” memiliki arti: pernyataan yang diakui keabsahannya; pengesahan; *n* hal atau keadaan sah. Teori ini mengupas tentang status individu atau organisasi dianggap sah, individu atau organisasi dianggap eksis keberadaannya jika diakui oleh masyarakat.

Instansi dan perusahaan harus selalu memedulikan keadaan sosial di sekitarnya. Dengan kepedulian tersebut, keberadaan instansi dan perusahaan dapat diterima masyarakat. Keberlangsungan kegiatan instansi dan perusahaan juga dapat berlanjut. Masyarakat selalu menilai kinerja lingkungan instansi dan perusahaan, sehingga rencana kegiatan atau kegiatan usaha harus diselaraskan dengan harapan masyarakat. Praktik tanggung jawab sosial dan pengungkapan sosial yang dilakukan instansi dan perusahaan dipandang sebagai suatu usaha untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap instansi dan perusahaan. Instansi dan perusahaan yang selalu berusaha menyelaraskan diri dengan norma masyarakat, maka keberadaan mereka akan diterima masyarakat dan dapat terus melakukan kegiatan usaha (Rochmi, 2007).

Hubungan antara ukuran organisasi dengan pengungkapan sosial perusahaan telah ditunjukkan dalam beberapa penelitian empiris (Belkaoui dan

Karpik, 1989; Cowen *et. al.*, 1987; Kelly, 1981; Ng, 1981; Patten, 1991 & 1992; Trotman dan Bradley, 1981). Teori legitimasi memiliki kaitan antara hubungan ukuran perusahaan dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat (Cowen *et. al.*, 1987).

2.1.4 Pengertian Akuntansi

Definisi akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu dari segi proses dan segi fungsi. Pendekatan segi proses menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolongkan, dan meringkas berbagai transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Setelah melakukan proses pencatatan, penggolongan, serta peringkasan transaksi, proses berikutnya adalah melaporkan hasil transaksi-transaksi keuangan dalam bentuk laporan keuangan (Revrison Baswir, 1999:4).

Pendekatan segi fungsi menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan. Informasi kuantitatif tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan lingkup ekonomi (Ahmed Belkaoli dalam Revrison Baswir, 1999:4).

Dari dua pendekatan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kegiatan mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi keuangan untuk diolah menjadi laporan keuangan yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan.

2.1.5 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun media pemberitahuan untuk publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam kegiatan pengendalian manajemen, mengukur kinerja, dan menyajikan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintahan, aliran kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca (Mardiasmo, 2004).

Tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh pemerintah agar dapat mengelola alokasi sumber daya secara tepat, efisien, serta ekonomis. Selain itu, akuntansi sektor publik juga menyajikan data yang digunakan untuk laporan pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan dana masyarakat. Dengan demikian, akuntansi sektor publik bertujuan menyediakan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas (*American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993)).

2.1.6 Pengertian Akuntansi Lingkungan

Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting* atau EA) merupakan istilah yang berkaitan dengan kebijakan memasukkan biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Biaya lingkungan harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang memengaruhi kualitas lingkungan (Ikhsan, 2008).

Penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan dapat mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Banyak perusahaan besar industri dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan, supaya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*) (Ikhsan, 2008).

2.1.7 Aspek-Aspek Akuntansi Lingkungan

Aspek-aspek akuntansi lingkungan adalah sebagai berikut, (Cahyono, 2002):

1. Pengakuan identifikasi pengaruh negatif aktifitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan dalam praktik akuntansi konvensional;
2. Identifikasi, mencari, dan memeriksa persoalan bidang akuntansi konvensional yang bertentangan dengan kriteria lingkungan serta memberikan solusi;
3. Melaksanakan langkah-langkah proaktif dalam menyusun inisiatif untuk memperbaiki lingkungan pada praktik akuntansi konvensional;
4. Pengembangan format baru sistem akuntansi keuangan dan nonkeuangan serta sistem pengendalian pendukung keputusan manajemen ramah lingkungan;
5. Identifikasi biaya-biaya dan pendapatan apabila perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan dari berbagai program perbaikan lingkungan;

6. Pengembangan format kerja, penilaian, serta pelaporan internal dan eksternal perusahaan.

2.1.8 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan

1. Ukuran Organisasi

Ukuran organisasi sudah digunakan secara luas dalam studi analisis penerapan akuntansi lingkungan pada sektor swasta (Theyel, 2000) dan dipakai juga pada sektor publik (Frost dan Toh, 1998). Ukuran organisasi dapat diukur dengan tingkat penjualan, jumlah pekerja, tingkat perputaran, total aset, dan pendapatan laba. Penelitian ini menggunakan total aset dan jumlah pekerja untuk mengukur ukuran organisasi.

2. Pernyataan Standar Akuntansi

Di negara Indonesia, aturan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik termaktub di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP bagian akuntansi belanja memberi pedoman bahwa pemerintah wajib menganggarkan dana untuk belanja fungsi perlindungan lingkungan hidup.

Sedangkan aturan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor privat tertuang di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK nomor 1 (revisi 2009) memberikan petunjuk bahwa entitas dapat menyajikan laporan mengenai

lingkungan hidup selain menyajikan laporan keuangan. PSAK nomor 57 (revisi 2009) mengatur: 1. Tanggung jawab entitas untuk menyelesaikan kewajiban melunasi biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang timbul masa kini akibat peristiwa masa lalu; 2. Entitas wajib melunasi biaya pemulihan kerusakan lingkungan karena ada peraturan perundang-undangan baru. Meskipun kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan telah terjadi masa lampau, jika peraturan yang baru mengharuskan untuk ditanggulangi, maka entitas wajib mengeluarkan biaya pemulihan kerusakan lingkungan.

3. Tingkat Pelaksanaan Manajemen Lingkungan (*Degree of Development of Environmental Management Practices/EMPI*)

Di sektor swasta (Bouma dan Wolters, 1999b) serta di sektor publik (Frost dan Seamer, 2002) terdapat sebuah fakta bahwa ada hubungan organisasi yang sudah menerapkan dan mengembangkan manajemen lingkungan dengan level pengungkapan lingkungan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Variabel Manajemen Lingkungan bersifat menjelaskan penerapan manajemen lingkungan dan pelaksanaan praktik akuntansi lingkungan di organisasi.

2.1.9 Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting Practices/EAPI*)

Berdasarkan pendekatan yang diadopsi oleh beberapa peneliti yang sudah menyelesaikan penelitian serupa di sektor publik Australia (Frost dan Toh, 1998) dalam rangka untuk menilai sampel entitas yang sudah menerapkan praktik

akuntansi lingkungan, kami sudah mengembangkan sebuah indeks yang mengukur luas penerapan praktik akuntansi lingkungan yang dikembangkan sesuai dengan entitas yang dianalisis.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang berjudul *Factors Influencing Environmental Accounting Practices in Portuguese Local Entities: A Multivariate Analysis* dilakukan di negara Portugal. Nama peneliti dan tahun penelitian tidak dicantumkan di hasil penelitian. Tujuan penelitian Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan di Berbagai Organisasi Tingkat Daerah di Negara Portugal adalah untuk menganalisis pengaruh faktor ukuran organisasi, pernyataan standar akuntansi, dan manajemen lingkungan terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan di organisasi tingkat daerah. Sampel penelitian berjumlah 62 responden.

Untuk menguji pengaruh tiga faktor independen terhadap satu faktor dependen, peneliti terdahulu menggunakan analisis persamaan regresi linear berganda. Berikut ini persamaan regresi linear berganda:

$$EAPI = \alpha_0 + \beta_1 \text{ SIZE} + \beta_2 \text{ ACC} + \beta_3 \text{ EMPI} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

EAPI: Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan

SIZE: Ukuran Organisasi

ACC: Pernyataan Standar Akuntansi

EMPI: Manajemen Lingkungan

α_0 : Tetapan

ε_i : Nilai Residu

Hasil perhitungan regresi penelitian sebelumnya di Portugal menunjukkan bahwa manajemen lingkungan adalah faktor yang paling memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan. Pernyataan standar akuntansi berada di urutan kedua, sedangkan ukuran organisasi di urutan ketiga.

Hasil penelitian pertama yaitu:

- a. Ukuran organisasi berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan
- b. Pernyataan standar akuntansi berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan
- c. Manajemen lingkungan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan

2. Penelitian kedua, yaitu “Pengaruh *Environmental Performance* Terhadap *Environmental Disclosure* dan *Economic Performance* serta *Environmental Disclosure* Terhadap *Economic Performance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” yang dilakukan oleh Ari Retno Handayani tahun 2010, bertujuan menganalisis pengaruh *environmental performance* terhadap

environmental disclosure dan *economic performance* serta *environmental disclosure* terhadap *economic performance*.

Hasil penelitian kedua yaitu:

- a. *Environmental performance* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*
- b. *Environmental performance* tidak berpengaruh terhadap *economic performance*
- c. *Environmental disclosure* juga tidak berpengaruh terhadap *economic disclosure*

3. Penelitian ketiga, yaitu “Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur *Go Publik*” yang dilakukan oleh Achmad Zaenuddin (tahun penelitian tidak disebutkan), bertujuan untuk mengidentifikasi item pengungkapan sosial dan lingkungan, menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik pengungkapan sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian ketiga yaitu:

ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, Tahun Penerbitan	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil
1		Dependen: Pelaksanaan	Regresi	manajemen lingkungan adalah faktor yang paling

	Tidak dicantumkan, <i>Factors Influencing Environmental Accounting Practices in Portuguese Local Entities: A Multivariate Analysis</i> , tidak dicantumkan	Akuntansi Lingkungan Independen: Ukuran Organisasi, Pernyataan Standar Akuntansi, Manajemen Lingkungan		memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan. Pernyataan standar akuntansi berada di urutan kedua. Ukuran organisasi tidak memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan
2	Ari Retno Handayani, Pengaruh <i>Environmental Performance Terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance</i> serta <i>Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), 2010	Dependen: <i>Environmental Disclosure dan Economic Performance</i> Independen: <i>Environmental Performance</i>	Regresi	<i>Environmental performance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> . <i>Environmental performance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>economic performance</i> . <i>Environmental disclosure</i> juga tidak berpengaruh terhadap <i>economic disclosure</i>
3	Achmad Zaenuddin, Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur <i>Go Publik</i> , tidak disebutkan	Dependen: Praktik Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan Independen: Ukuran Organisasi	Regresi	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan

2.3 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan akuntansi lingkungan pada organisasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ukuran organisasi, pernyataan standar akuntansi, dan manajemen lingkungan.

Landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan Variabel Ukuran Organisasi memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan adalah teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan, semakin besar ukuran instansi atau perusahaan, maka pengaruh instansi atau perusahaan terhadap masyarakat juga semakin besar. Dampak kinerja lingkungan instansi atau perusahaan juga makin terasa oleh masyarakat akibat ukuran organisasi yang besar. Selain itu, tekanan masyarakat terhadap instansi atau perusahaan untuk memublikasikan laporan kinerja lingkungan juga makin tinggi (Cowen *et. al.*, 1987). Laporan kinerja lingkungan menampilkan dari sisi keuangan. Jika menampilkan dari sisi keuangan, dapat disimpulkan instansi atau perusahaan harus menjalankan pelaksanaan akuntansi lingkungan. Oleh karena itu, teori legitimasi menjadi landasan bahwa ukuran organisasi memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan.

Landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan Variabel Pernyataan Standar Akuntansi memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan adalah teori sistem dan pertanggungjawaban sosial. Teori sistem dan pertanggungjawaban sosial menjelaskan, pengaruh peraturan atau regulasi yang dibuat pemerintah atau badan pembuat regulasi berpengaruh langsung terhadap kebijakan dan kinerja instansi dan perusahaan (Rochmi, 2007). Dalam penelitian ini, peraturan pemerintah atau regulasi yang dimaksud adalah pernyataan standar akuntansi

untuk instansi pemerintah dan perusahaan. Sehingga, pernyataan standar akuntansi pemerintah dan pernyataan standar akuntansi perusahaan memengaruhi penerapan pelaksanaan akuntansi lingkungan. Oleh karena itu, teori sistem dan pertanggungjawaban sosial menjadi landasan bahwa pernyataan standar akuntansi memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan.

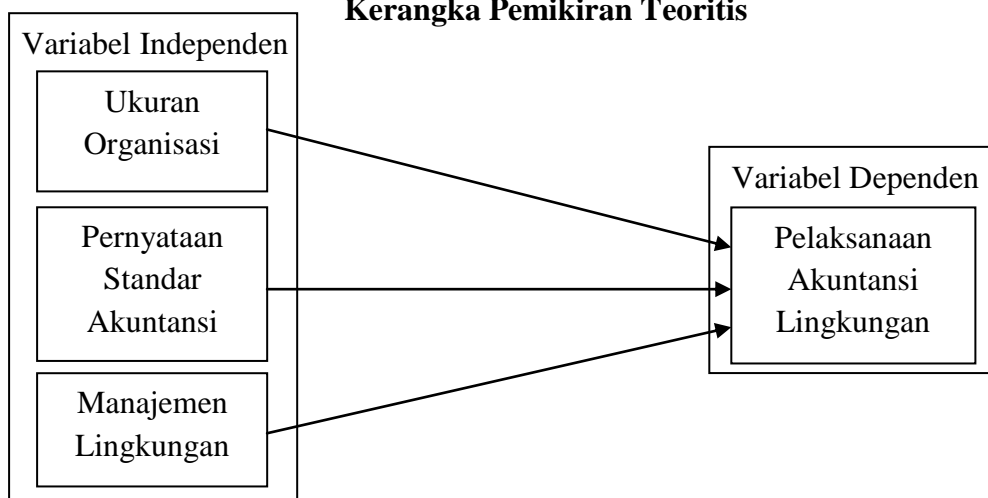
Landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan Variabel Manajemen Lingkungan memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan adalah teori pemangku kepentingan (*stakeholder*). Teori pemangku kepentingan (*stakeholder*) menjelaskan, eksistensi instansi dan perusahaan dipengaruhi oleh dukungan pemangku kepentingan (Januarti dan Apriyanti, 2005). Teori pemangku kepentingan juga menerangkan, instansi maupun perusahaan menaruh harapan atau kehendak pemangku kepentingan pada visi dan misi instansi mereka supaya eksistensi tetap terjaga.

Isu lingkungan memengaruhi keadaan berbagai kelompok. LSM dan pencinta lingkungan juga semakin kritis mengkritik kinerja lingkungan instansi dan perusahaan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pencinta lingkungan adalah pemangku kepentingan (Januarti dan Apriyanti 2005). berdasarkan teori pemangku kepentingan, yaitu eksistensi instansi dan perusahaan dipengaruhi oleh dukungan pemangku kepentingan, pengelola instansi dan manajemen perusahaan akan menerapkan manajemen lingkungan dan pelaksanaan akuntansi lingkungan. Terlebih, pemerintah juga pemangku kepentingan (Rochmi, 2007), sehingga desakan penerapan manajemen lingkungan dan pelaksanaan akuntansi lingkungan semakin kuat. Oleh karena itu, pemangku kepentingan (*stakeholder*) menjadi

landasan bahwa manajemen lingkungan memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan.

landasan teori menjadi penjabar pengaruh tiap faktor independen terhadap faktor dependen, maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini adalah:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

Ukuran organisasi berpengaruh positif terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan (Hackston dan Milne, 1996; Frost dan Toh, 1998; Frost dan Seamer, 2002) karena, secara umum organisasi ukuran besar sanggup memberikan pendanaan dan menyediakan tenaga kerja untuk melaksanakan aktivitas yang bertujuan mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan usaha

organisasi tersebut. Organisasi ukuran besar cenderung menyiapkan sistem akuntansi mereka untuk meningkatkan level pengungkapan informasi lingkungan menjadi lebih terbuka daripada organisasi ukuran kecil. Di sisi lain, organisasi pemerintahan ukuran besar cenderung mendapat lebih banyak tekanan dari publik daripada organisasi pemerintahan ukuran kecil untuk mengungkapkan informasi penggunaan uang rakyat yang digunakan untuk usaha pencegahan polusi dan kegiatan perlindungan lingkungan hidup (Deegan dan Gordon, 1996). Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian di atas, maka penulis memprediksi ada korelasi positif antara tingkat pelaksanaan akuntansi lingkungan dengan ukuran organisasi. Sehingga, penelitian ini mengajukan hipotesis pertama yang tertulis di bawah ini:

Hipotesis 1: Ukuran organisasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat pelaksanaan akuntansi lingkungan.

Beberapa tahun ini, pengaruh hukum serta pengaturan kerangka akuntansi tentang pengungkapan lingkungan yang dibuat oleh berbagai perusahaan mendapat perhatian dari para peneliti (Holland dan Foo, 2003; Larrinaga *et al.*, 2002; Llana *et al.*, 2007; Criado-Jiménez *et al.*, 2008). Dalam hal ini, banyak peneliti telah menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan sektor publik dan sektor privat dipengaruhi oleh pernyataan standar akuntansi suatu negara.

Komite pembuat pernyataan standar akuntansi menganggap keberadaan standar akuntansi tentang lingkungan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi lingkungan. Hasil dari peningkatan kualitas pengungkapan informasi

lingkungan adalah penemuan hubungan antara keberadaan regulasi akuntansi lingkungan dengan pelaksanaan akuntansi lingkungan di berbagai organisasi sektor publik dan sektor privat.

Oleh karena itu, penulis memasukkan variabel independen pernyataan standar akuntansi ke dalam hipotesis karena akuntansi sektor publik dan sektor privat di Indonesia memiliki pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sehingga, penelitian ini mengajukan hipotesis kedua yang tertulis di bawah ini:

Hipotesis 2: Pernyataan standar akuntansi mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan.

Beberapa hasil penelitian di sektor privat (Bouma dan Wolters, 1999) serta di sektor publik (Frost dan Seamer, 2002) menunjukkan fakta ada hubungan variabel organisasi yang sudah menerapkan dan mengembangkan manajemen lingkungan dengan level pengungkapan lingkungan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, manajemen lingkungan dapat bersifat menjelaskan pengungkapan lingkungan dan menjadi faktor penentu dari pelaksanaan akuntansi lingkungan di sektor privat dan sektor publik. Sehingga, penelitian ini mengajukan hipotesis ketiga yang tertulis di bawah ini:

Hipotesis 3: manajemen lingkungan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di bab ini akan diuraikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akuntansi lingkungan.

Berdasarkan pendekatan yang diadopsi oleh beberapa peneliti yang sudah menyelesaikan penelitian serupa di sektor publik Australia (Frost dan Toh, 1998) dalam rangka untuk menilai sampel entitas yang sudah menerapkan pelaksanaan akuntansi lingkungan, kami sudah mengembangkan sebuah

indeks yang mengukur tingkat pelaksanaan akuntansi lingkungan yang dikembangkan sesuai dengan entitas yang dianalisis.

2. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran organisasi, pernyataan standar akuntansi, dan manajemen lingkungan.

Ukuran organisasi sudah digunakan secara luas dalam studi analisis pelaksanaan akuntansi lingkungan pada sektor swasta (Theyel, 2000) dan dipakai juga pada sektor publik (Frost dan Toh, 1998). Ukuran organisasi dapat diukur dengan tingkat penjualan, jumlah pekerja, tingkat perputaran, total aset, dan pendapatan laba. Penelitian ini menggunakan total aset dan jumlah pegawai untuk menganalisis ukuran organisasi.

Di negara Indonesia, pernyataan standar akuntansi sektor publik termaktub di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP bagian akuntansi belanja memberi pedoman bahwa pemerintah wajib menganggarkan dana untuk belanja fungsi perlindungan lingkungan hidup.

Sedangkan pernyataan standar akuntansi sektor privat tertuang di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK nomor 1 (revisi 2009) memberikan petunjuk bahwa entitas dapat menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup selain menyajikan laporan keuangan. PSAK nomor 57 (revisi 2009) mengatur: 1. Tanggung jawab entitas untuk menyelesaikan kewajiban melunasi biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang timbul masa kini akibat peristiwa masa

lalu; 2. Entitas wajib melunasi biaya pemulihan kerusakan lingkungan karena ada peraturan perundang-undangan baru. Meskipun kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan telah terjadi masa lampau, jika peraturan yang baru mengharuskan untuk ditanggulangi, maka entitas wajib mengeluarkan biaya pemulihan kerusakan lingkungan.

Di sektor swasta (Bouma dan Wolters, 1999b) serta di sektor publik (Frost dan Seamer, 2002) terdapat sebuah fakta bahwa ada hubungan organisasi yang sudah menerapkan dan mengembangkan manajemen lingkungan dengan level pengungkapan lingkungan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Variabel manajemen lingkungan bersifat menjelaskan pelaksanaan manajemen lingkungan dan pelaksanaan praktik akuntansi lingkungan di organisasi.

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur sehingga peneliti dapat mengetahui nilai pengukuran tersebut. Definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Ukuran Organisasi

Cara mengukur: menjumlah total nilai di kuesioner. Lalu, total nilai kuesioner dibagi dengan nilai maksimum. Hasilnya adalah nilai ukuran organisasi per responden. Untuk mengetahui nilai ukuran organisasi sampel penelitian yaitu jumlahkan nilai ukuran organisasi tiap responden, lalu bagi dengan jumlah responden yang diteliti.

Tabel 3.1 adalah pertanyaan Variabel Ukuran Organisasi yang digunakan saat penelitian di badan lingkungan hidup (BLH), kantor lingkungan hidup (KLH), dinas kebersihan, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Tabel 3.1
Ukuran Organisasi

No.	Pertanyaan	Nilai
1	Berapa rupiah total aset instansi Anda tahun 2011?	1-5
2	Berapa orang jumlah pegawai tetap di instansi Anda tahun 2011?	1-5
	Nilai maksimum:	10

Sumber: "Factors Influencing Environmental Accounting Practices in Portuguese Local Entities: A Multivariate Analysis".

2. Pernyataan Standar Akuntansi

Cara mengukur: menjumlah total nilai di kuesioner. Lalu, total nilai kuesioner dibagi dengan nilai maksimum. Hasilnya adalah nilai pernyataan standar akuntansi per responden. Untuk mengetahui nilai pernyataan standar akuntansi sampel penelitian yaitu jumlahkan nilai pernyataan standar akuntansi tiap responden, lalu bagi dengan jumlah responden yang diteliti.

Tabel 3.2 adalah pertanyaan Variabel Pernyataan Standar Akuntansi yang digunakan saat penelitian di badan lingkungan hidup (BLH) atau kantor lingkungan hidup (KLH) dan dinas kebersihan.

Tabel 3.2
Pernyataan Standar Akuntansi BLH/KLH, Dinas Kebersihan

No.	Pertanyaan & Alasan Pertanyaan Digunakan	Nilai
-----	--	-------

1	Apakah instansi Anda menaati Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sektor publik? <i>Untuk mengetahui apakah instansi menerapkan SAP</i>	0-1
2	Menurut Anda, apakah SAP untuk melaksanakan amanat pasal 1 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009? <i>Untuk mengetahui apakah instansi tahu dasar pembuatan SAP bukan berasal UU Nomor 32 Tahun 2009</i>	0-1
3	Menurut Anda, apakah SAP untuk melaksanakan amanat pasal 32 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2003? <i>Untuk mengetahui apakah instansi tahu dasar pembuatan SAP berasal UU Nomor 17 Tahun 2003</i>	0-1
4	Menurut Anda, Apakah SAP mewajibkan untuk menganggarkan biaya untuk lingkungan hidup? <i>Untuk mengetahui apakah instansi tahu SAP mewajibkan anggaran lingkungan hidup</i>	0-1
5	Jika mewajibkan untuk menganggarkan, biaya untuk lingkungan hidup diklasifikasikan belanja apa? <i>Untuk mengetahui apakah instansi tahu anggaran lingkungan diklasifikasikan di anggaran belanja fungsi atau tidak</i>	0-1
	Nilai maksimum	5

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 3.3, pada halaman berikutnya adalah pertanyaan Variabel Pernyataan standar akuntansi yang digunakan saat penelitian di perusahaan daerah air minum (PDAM).

Tabel 3.3: Pernyataan Standar Akuntansi PDAM

No.	Pertanyaan & Alasan Pertanyaan Digunakan	Nilai
1	Apakah perusahaan Anda menaati Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sektor privat? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD menerapkan PSAK Nomor</i>	0-1

	<i>1</i>	
2	Menurut Anda, PSAK Nomor 1 membahas apa?	0-1
3	Menurut Anda, apakah PSAK Nomor 1 mengizinkan untuk menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD tahu PSAK mengizinkan menyajikan laporan kinerja lingkungan atau tidak</i>	0-1
4	Jika diizinkan menyajikan laporan lingkungan hidup, apakah laporan tersebut dipisahkan dari laporan keuangan? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD tahu laporan kinerja lingkungan dipisah dari laporan keuangan atau tidak</i>	0-1
5	Apakah perusahaan Anda menaati Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 57 saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sektor privat? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD menerapkan PSAK Nomor 57</i>	0-1
6	Menurut Anda, PSAK Nomor 57 membahas apa? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD tahu PSAK Nomor 57 membahas kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi, atau tidak</i>	0-1
7	Menurut Anda, biaya pemulihan pencemaran lingkungan dianggap sebagai apa? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD tahu biaya pencemaran lingkungan dianggap sebagai kewajiban diestimasi atau tidak</i>	0-1
8	<i>Contoh kasus: Tahun 2003, PT X membuang limbah beracun ke sungai saat menjalankan kegiatan produksi. Tahun 2007, terbit undang-undang yang mewajibkan, perusahaan yang membuang limbah beracun bertanggungjawab untuk menanggulangi dampaknya. Menurut Anda, apakah PT X berkewajiban menanggulangi dampak pencemaran akibat pembuangan limbah beracun pada tahun 2003? Untuk mengetahui apakah BUMD tahu PT X berkewajiban menanggulangi atau tidak</i>	0-1
	Nilai maksimum	8

Sumber: PSAK Nomor 1 (revisi 2009) dan PSAK Nomor 57 (revisi 2009).

3. Manajemen Lingkungan

Cara mengukur: menjumlah total nilai di kuesioner. Lalu, total nilai kuesioner dibagi dengan nilai maksimum. Hasilnya adalah nilai manajemen lingkungan per responden. Untuk mengetahui nilai manajemen lingkungan sampel penelitian yaitu jumlahkan nilai manajemen lingkungan tiap responden, lalu bagi dengan jumlah responden yang diteliti.

Tabel 3.4 adalah pertanyaan Variabel Manajemen Lingkungan yang digunakan saat penelitian di badan lingkungan hidup (BLH) atau kantor lingkungan hidup (KLH) dan dinas kebersihan.

Tabel 3.4
Manajemen Lingkungan BLH/KLH, Dinas Kebersihan

No.	Pertanyaan & Alasan Pertanyaan Digunakan	Nilai
1	Apakah di instansi Anda terdapat bagian yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan kantor? <i>Untuk mengetahui apakah instansi menjaga kelestarian lingkungan kantor atau tidak</i>	0-1
2	Apakah instansi Anda menerapkan sistem manajemen lingkungan? <i>Untuk mengetahui apakah instansi menerapkan sistem manajemen lingkungan atau tidak</i>	0-1
3	Apakah instansi Anda pernah melakukan pelatihan kepada pegawai tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup? <i>Untuk mengetahui apakah instansi memberi pelatihan pegawai bagaimana menjaga kelestarian lingkungan atau tidak</i>	0-1
4	Apakah instansi Anda melakukan pengawasan rutin kondisi kelestarian lingkungan hidup sekitar kantor terhadap dampak kegiatan kerja? <i>Untuk mengetahui apakah instansi melakukan pengawasan lingkungan hidup sekitar terhadap aktivitas kerja atau tidak</i>	0-1
5	Apakah instansi Anda mengidentifikasi risiko lingkungan?	0-1

	<i>Untuk mengetahui apakah instansi mengidentifikasi risiko lingkungan atau tidak</i>	
6	Apakah instansi Anda memperoleh sertifikat ISO 14001? <i>Untuk mengetahui apakah instansi memperoleh ISO 14001 atau tidak</i>	0-1
7	Apakah instansi Anda melaksanakan audit lingkungan? <i>Untuk mengetahui apakah instansi melakukan audit lingkungan atau tidak</i>	0-1
8	Apakah instansi Anda melakukan pemeriksaan aktivitas kerja, apakah ramah lingkungan atau tidak? <i>Untuk mengetahui apakah instansi melakukan aktivitas kerja yang ramah lingkungan atau tidak</i>	0-1
9	Apakah instansi Anda saat ini (ketika menerima kuesioner) sedang/telah merealisasikan anggaran Belanja Bahan/Material yang di dalamnya terdapat rincian objek untuk lingkungan hidup? <i>Untuk mengetahui apakah instansi merealisasikan anggaran belanja bahan/material untuk lingkungan atau tidak</i>	0-1
10	Apakah instansi Anda saat ini (ketika menerima kuesioner) sedang/telah merealisasikan anggaran Belanja Bahan Pakai Habis yang di dalamnya terdapat rincian objek Belanja Bahan Bakar yang Terbarukan? <i>Untuk mengetahui apakah instansi merealisasikan anggaran belanja bahan bakar terbarukan atau tidak</i>	0-1
11	Apakah instansi Anda saat ini (ketika menerima kuesioner) sedang/telah merealisasikan anggaran Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman yang di dalamnya terdapat rincian objek untuk lingkungan hidup? <i>Untuk mengetahui apakah instansi merealisasikan anggaran belanja modal pengadaan tanaman atau tidak</i>	0-1
12	Apakah instansi Anda melakukan penghematan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, di dalam objek Belanja Bahan Pakai Habis? <i>Untuk mengetahui apakah instansi melakukan penghematan belanja bahan bakar minyak/gas atau tidak</i>	0-1

13	Apakah instansi Anda melakukan penghematan Belanja Air, di dalam objek Belanja Jasa Kantor? <i>Untuk mengetahui apakah instansi melakukan penghematan belanja air atau tidak</i>	0-1
14	Apakah instansi Anda melakukan penghematan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, di dalam objek Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor? <i>Untuk mengetahui apakah instansi melakukan penghematan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas untuk kendaraan bermotor atau tidak</i>	0-1
15	Apakah instansi Anda memublikasikan laporan kegiatan di bidang lingkungan hidup untuk masyarakat umum? <i>Untuk mengetahui apakah instansi memublikasikan laporan kinerja lingkungan atau tidak</i>	0-1
16	Apakah instansi Anda memublikasikan laporan penghematan penggunaan anggaran untuk masyarakat umum? <i>Untuk mengetahui apakah instansi memublikasikan laporan penghematan anggaran atau tidak</i>	0-1
	Nilai maksimum	16

Sumber: penelitian "Factors Influencing Environmental Accounting Practices in Portuguese Local Entities: A Multivariate Analysis" dan Buku Akuntansi Manajerial, penerbit Salemba Empat, Jakarta, Pengarang: Hansen&Mowen.

Tabel 3.5 adalah pertanyaan Variabel Manajemen Lingkungan yang digunakan saat penelitian di perusahaan daerah air minum (PDAM).

Tabel 3.5
Manajemen Lingkungan PDAM

No.	Pertanyaan	Nilai
1	Apakah perusahaan Anda terdapat bagian yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan dari dampak buruk kegiatan usaha, hasil produksi, serta limbah aktivitas produksi? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD menjaga kelestarian lingkungan kantor atau tidak</i>	0-1
2	Apakah perusahaan Anda menerapkan sistem manajemen	0-1

	lingkungan? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD menerapkan sistem manajemen lingkungan atau tidak</i>	
3	Apakah perusahaan Anda pernah memberikan pelatihan kepada pegawai tentang cara menjaga kelestarian lingkungan hidup? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD memberi pelatihan pegawai bagaimana menjaga kelestarian lingkungan atau tidak</i>	0-1
4	Apakah perusahaan Anda melakukan pengawasan rutin kondisi kelestarian lingkungan hidup sekitar kantor terhadap dampak kegiatan usaha? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD melakukan pengawasan lingkungan hidup sekitar terhadap aktivitas kerja atau tidak</i>	0-1
5	Apakah perusahaan Anda mengidentifikasi risiko lingkungan? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD mengidentifikasi risiko lingkungan atau tidak</i>	0-1
6	Apakah perusahaan Anda memperoleh sertifikat ISO 14001? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD memperoleh ISO 14001 atau tidak</i>	0-1
7	Apakah perusahaan Anda melaksanakan audit lingkungan? <i>Untuk mengetahui apakah instansi melakukan audit lingkungan atau tidak</i>	0-1
8	Apakah perusahaan Anda mengukur tingkat pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan usaha? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD melakukan aktivitas kerja yang ramah lingkungan atau tidak</i>	0-1
9	Apakah perusahaan Anda melakukan pemeriksaan proses, produk, dan limbah usaha, apakah ramah lingkungan atau tidak? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD melakukan pemeriksaan proses, produk, limbah usaha ramah lingkungan atau tidak</i>	0-1
10	Apakah perusahaan Anda mengoperasikan peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD mengoperasikan alat daur</i>	0-1

	<i>ulang limbah agar mereduksi polusi atau tidak</i>	
11	Apakah perusahaan Anda mengoperasikan peralatan untuk mengolah limbah beracun? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD menetralkan limbah beracun sebelum dibuang ke lingkungan atau tidak</i>	0-1
12	Apakah perusahaan Anda mengoperasikan peralatan untuk mendaur ulang sisa bahan? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD mendaur limbah menjadi barang bermanfaat atau tidak</i>	0-1
13	Apakah perusahaan Anda memublikasikan biaya lingkungan serta keuntungan lingkungan di media cetak atau media elektronik? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD memublikasikan laporan biaya lingkungan atau tidak</i>	0-1
14	Apakah perusahaan Anda memublikasikan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan di media cetak atau media elektronik? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD memublikasikan laporan keberlanjutan atau tidak</i>	0-1
	Nilai maksimum	14

Sumber: penelitian "Factors Influencing Environmental Accounting Practices in Portuguese Local Entities: A Multivariate Analysis" dan Buku Akuntansi Manajerial, penerbit Salemba Empat, Jakarta, Pengarang: Hansen&Mowen.

4. Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan

Cara mengukur: Menjumlah total nilai di kuesioner. Lalu, total nilai kuesioner dibagi dengan nilai maksimum. Hasilnya adalah nilai pelaksanaan akuntansi lingkungan per responden. Untuk mengetahui nilai pelaksanaan akuntansi lingkungan sampel penelitian yaitu jumlahkan nilai pelaksanaan akuntansi lingkungan tiap responden, lalu bagi dengan jumlah responden yang diteliti.

Tabel 3.6 adalah pertanyaan Variabel Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan yang digunakan saat penelitian di badan lingkungan hidup (BLH) atau kantor lingkungan hidup (KLH) dan dinas kebersihan.

Tabel 3.6
Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan BLH/KLH, Dinas Kebersihan

No.	Pertanyaan	Nilai
1	Apakah instansi Anda menyediakan anggaran belanja untuk lingkungan hidup? <i>Untuk mengetahui apakah instansi menyediakan anggaran belanja lingkungan hidup atau tidak</i>	0-1
2	Jika menganggarkan, berapa rupiah anggaran belanja untuk lingkungan hidup tahun ini (2012)? <i>Untuk mengetahui berapa nilai anggaran lingkungan hidup 2012</i>	0-1
3	Berapa rupiah anggaran belanja untuk lingkungan hidup tahun 2011 di instansi Anda? <i>Untuk mengetahui berapa nilai anggaran lingkungan hidup 2011</i>	0-1
4	Berapa persen realisasi dana yang digunakan dari anggaran belanja untuk lingkungan hidup tahun 2011 di instansi Anda? <i>Untuk mengetahui berapa besar nilai realisasi anggaran 2011</i>	0-1
5	Apakah pada anggaran instansi Anda, di dalam objek Belanja Bahan/Material , jenis Belanja Barang dan Jasa , kelompok Belanja Langsung , akun Belanja Daerah tahun ini (2012) terdapat rincian objek untuk lingkungan hidup? <i>Misal: rincian objek Belanja Bahan/Bibit Tanaman</i> <i>Untuk mengetahui apakah anggaran 2012 terdapat belanja bahan/material lingkungan hidup atau tidak</i>	0-1
6	Apakah pada anggaran instansi Anda, di dalam objek Belanja Bahan Pakai Habis , jenis Belanja Barang dan Jasa , kelompok Belanja Langsung , akun Belanja Daerah tahun ini (2012) terdapat rincian objek Belanja Bahan Bakar yang Terbarukan ? <i>Contoh bahan bakar terbarukan:</i>	0-1

	<p><i>biogas, biodiesel, bioethanol</i></p> <p><i>Untuk mengetahui apakah anggaran 2012 terdapat belanja bahan bakar terbarukan atau tidak</i></p>	
7	<p>Apakah pada anggaran instansi Anda, di dalam objek Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman, jenis Belanja Modal, kelompok Belanja Langsung, akun Belanja Daerah tahun ini (2012) terdapat rincian objek untuk lingkungan hidup? <i>Misal: rincian objek Belanja Modal Pengadaan Tanaman</i></p> <p><i>Untuk mengetahui apakah anggaran 2012 terdapat belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman lingkungan hidup atau tidak</i></p>	0-1
8	<p>Apakah pada anggaran instansi Anda, di dalam objek Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah, akun Pembiayaan Daerah tahun 2011 terdapat rincian objek Belanja Barang dan Jasa</p> <p><i>Untuk mengetahui apakah anggaran 2012 terdapat SILPA dari objek belanja barang dan jasa atau tidak</i></p>	0-1
9	<p>Jika ada, apakah rincian objek Belanja Barang dan Jasa, di dalam objek Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya tahun 2011 muncul akibat penghematan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, di dalam objek Belanja Bahan Pakai Habis?</p> <p><i>Untuk mengetahui apakah anggaran 2012 terdapat SILPA dari objek belanja bahan pakai habis atau tidak</i></p>	0-1
10	<p>Jika ada, apakah rincian objek Belanja Barang dan Jasa, di dalam objek Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya tahun 2011 muncul akibat penghematan Belanja Air, di dalam objek Belanja Jasa Kantor?</p> <p><i>Untuk mengetahui apakah anggaran 2012 terdapat SILPA dari objek belanja jasa kantor atau tidak</i></p>	0-1

11	Jika ada, apakah rincian objek Belanja Barang dan Jasa , di dalam objek Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya tahun 2011 muncul akibat penghematan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas , di dalam objek Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor ? <i>Untuk mengetahui apakah anggaran 2012 terdapat SILPA dari objek belanja perawatan kendaraan bermotor</i>	0-1
12	Apakah instansi Anda membuat laporan kegiatan di bidang lingkungan hidup? <i>Untuk mengetahui apakah instansi membuat laporan kegiatan lingkungan hidup atau tidak</i>	0-1
13	Apakah instansi Anda membuat laporan penghematan penggunaan anggaran? <i>Untuk mengetahui apakah instansi membuat laporan penghematan penggunaan anggaran atau tidak</i>	0-1
Nilai maksimum		13

Sumber: penelitian "Factors Influencing Environmental Accounting Practices in Portuguese Local Entities: A Multivariate Analysis" dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Tabel 3.7 adalah pertanyaan Variabel Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan yang digunakan saat penelitian di perusahaan daerah air minum (PDAM).

Tabel 3.7
Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan PDAM

No.	Pertanyaan	Nilai
1	Apakah perusahaan Anda menyediakan anggaran belanja untuk lingkungan hidup? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD menyediakan anggaran belanja lingkungan hidup atau tidak</i>	0-1
2	Jika menganggarkan, berapa rupiah anggaran pelestarian lingkungan tahun ini (2012)? <i>Untuk mengetahui nilai anggaran lingkungan hidup 2012</i>	0-1
3	Berapa rupiah anggaran lingkungan hidup tahun 2011? <i>Untuk mengetahui berapa nilai anggaran lingkungan hidup 2011</i>	0-1
4	Berapa persen realisasi dana yang digunakan dari anggaran belanja untuk lingkungan hidup tahun 2011 di perusahaan Anda?	0-1

	<i>Untuk mengetahui berapa besar nilai realisasi anggaran 2011</i>	
5	<p>Apakah perusahaan Anda menghitung biaya lingkungan? <i>Biaya lingkungan adalah biaya yang timbul karena kegiatan usaha, hasil produksi, dan limbah produksi memberikan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan secara jangka pendek atau jangka panjang.</i> <i>Misal: PT X adalah perusahaan kain batik. PT X membuang limbah cair yang beracun ke sungai secara langsung, tanpa menetralsisir terlebih dahulu. Padahal, sungai tersebut dimanfaatkan peternak ikan mas untuk membudidayakan ikan. Banyak ikan yang mati akibat air sungai terkontaminasi limbah dari PT X.</i> <i>PT X harus mengeluarkan dana kompensasi kepada para peternak yang ikan ternakannya mati akibat pencemaran limbah. Selain itu, air sungai tersebut juga dimanfaatkan warga kota untuk keperluan air minum. PT X berpotensi menanggung jumlah biaya lingkungan lebih besar.</i> <i>Untuk mengetahui apakah BUMD menghitung biaya lingkungan atau tidak</i></p>	0-1
6	<p>Apakah perusahaan Anda mengkategorikan biaya lingkungan menjadi ke beberapa kategori? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD mengkategorikan biaya lingkungan atau tidak</i></p>	0-1
7	<p>Jika mengkategorikan, ada berapa buah kategori? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD mengkategorikan biaya lingkungan dengan benar, yaitu empat buah, atau tidak</i></p>	0-1
8	<p>Apakah perusahaan Anda membuat laporan biaya lingkungan? <i>Untuk mengetahui apakah BUMD membuat laporan biaya lingkungan atau tidak</i></p>	0-1
9	<p>Jika membuat, berapa persentase biaya lingkungan dari biaya operasional? <i>Untuk mengetahui komposisi biaya lingkungan dari biaya operasional</i></p>	0-1
10	<p>Apakah perusahaan Anda melaporkan biaya lingkungan dan keuntungan lingkungan pada laporan keuangan? <i>Keuntungan lingkungan adalah dana yang mengalir ke kas instansi/perusahaan karena kegiatan penghematan, daur ulang, pengolahan limbah berbahaya, pemanfaatan limbah menjadi barang yg bernilai ekonomi.</i></p>	0-1

	<i>Untuk mengetahui apakah BUMD membuat laporan biaya dan keuntungan lingkungan atau tidak</i>	
11	Apakah bagian akuntansi perusahaan Anda terlibat langsung dalam proses pencatatan dan pelaporan biaya lingkungan serta keuntungan lingkungan di laporan keuangan atau laporan keberlanjutan? <i>Untuk mengetahui apakah bagian akuntansi terlibat dalam pembuatan laporan biaya dan keuntungan lingkungan atau tidak</i>	0-1
	Nilai maksimum	11

Sumber: penelitian "Factors Influencing Environmental Accounting Practices in Portuguese Local Entities: A Multivariate Analysis" dan Buku Akuntansi Manajerial, penerbit Salemba Empat, Jakarta, Pengarang: Hansen&Mowen.

Tabel 3.8
Ringkasan Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator
Ukuran Organisasi	Variabel untuk mengukur ukuran organisasi. Ukuran organisasi diukur dari total aset dan jumlah pegawai	nilai ukuran organisasi sampel penelitian
Pernyataan Standar Akuntansi	Variabel untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam menerapkan peraturan akuntansi yang dibuat oleh badan pembuat regulasi akuntansi	nilai pernyataan standar akuntansi sampel penelitian
Manajemen Lingkungan	Variabel untuk mengukur penerapan manajemen lingkungan suatu organisasi	nilai manajemen lingkungan sampel penelitian
Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan	Variabel untuk mengukur pelaksanaan akuntansi lingkungan suatu organisasi	nilai pelaksanaan akuntansi lingkungan sampel penelitian

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Objek penelitian ini adalah instansi pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota dan badan usaha milik daerah (BUMD) tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah keseluruhan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah 29 buah, kota berjumlah 6 buah. Total kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah adalah 35 buah.

Tiap kabupaten/kota memiliki badan lingkungan hidup/kantor lingkungan hidup serta perusahaan daerah air minum, sehingga total populasi adalah 70 buah. Dinas kebersihan juga diteliti, tapi tidak setiap kabupaten/kota memiliki dinas kebersihan. Sehingga, populasi penelitian yang pasti adalah 70 buah.

Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode sampel tidak acak pengambilan sesaat (*accidental sampling*). Pertimbangan menggunakan metode pengambilan sesaat karena keterbatasan surveyor. Surveyor penelitian ini hanya satu orang, sedangkan data diperoleh dengan berkeliling kabupaten/kota Jawa Tengah. Faktor pendukung lain yaitu keterbatasan dana penelitian, batas waktu penelitian, dan birokrasi beberapa pemerintah daerah yang memperlambat proses penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai bahan pengujian hipotesis. Definisi data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber data. Sedangkan sumber data penelitian ini berasal dari badan lingkungan hidup atau kantor lingkungan hidup kabupaten/kota serta perusahaan daerah air minum kabupaten/kota.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk memperoleh data dari tiap anggota populasi yang diteliti. Cara memperoleh data penelitian yaitu dengan mengirim kuesioner (pertanyaan tertulis) kepada responden.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini berikhtiar menyajikan informasi statistik hasil pengujian hipotesis yang mudah dipahami oleh pembaca dan dapat dipercaya. Karena itu, penelitian ini menggunakan alat bantu perangkat lunak pengolah data statistik *Statistical Package for the Social Science (SPSS)*

Penelitian ini menggunakan metode analisis uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis untuk menghasilkan data statistik yang mudah dipahami dan dapat dipercaya. Berikut akan dijelaskan pengertian metode analisis yang digunakan.

3.5 .1 Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan mengetahui nilai validitas kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Cara mengukur nilai validitas yaitu dengan mengkorelasikan setiap skor variabel jawaban responden dengan jumlah skor masing-masing variabel. Lalu, hasil pengkorelasian dibandingkan dengan nilai kritis pada nilai taraf validitas 0,05. Jika hasil pengkorelasian lebih kecil dari 0,05, maka data kuesioner valid. Jika lebih besar,

maka tidak valid. Tinggi rendahnya nilai validitas mencerminkan data yang terkumpul menyimpang atau tidak dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

3.5 .2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap instrumen kuesioner. Suatu instrumen memiliki tingkat kepercayaan tinggi (baca: konsisten) jika pengujian menunjukkan hasil yang tepat. Cara mengukur nilai reliabilitas dengan menggunakan pendekatan internal *consistency reliability*, dengan memakai *Cronbach Alpha* untuk mengidentifikasi seberapa konsisten item-item pertanyaan dalam kuesioner saling berhubungan dengan pertanyaan yang lain. Kuesioner akan dianggap konsisten jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2001).

3.5 .3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan menyajikan informasi tentang nilai minimum, nilai maksimum, nilai tengah (*mean*), serta nilai deviasi standar variabel dependen dan variabel independen dari penelitian ini.

3.5 .4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik bertujuan menganalisis model regresi penelitian terbebas dari penyimpangan asumsi klasik atau tidak. Bila model regresi terindikasi menyimpang dari uji asumsi klasik, maka hasil penelitian tidak akurat.

Ada faktor lain yang memengaruhi hasil penelitian selain variabel-variabel yang digunakan.

Uji asumsi klasik terdiri dari:

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan mengetahui tingkat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Untuk mendeteksi koliniearitas yaitu dengan membaca angka *Variance Inflation Factor* (VIF) atau nilai *tolerance*. Bila angka VIF dan nilai *tolerance* mendekati angka satu, maka model regresi tidak mendapat gejala multikolinearitas.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan mengetahui apakah variabel dependen berkorelasi dengan dirinya sendiri. Untuk mendeteksi autokorelasi yaitu dengan membaca angka *Durbin-Watson* (D-W). Bila angka D-W berada di antara -2 hingga 2, maka model regresi bebas dari kondisi autokorelasi. Jika angka D-W berada kurang dari -2 atau lebih dari 2, maka model regresi mengalami autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

homokedastisitas. Jika berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas (Ghozali, 2001).

4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam sebuah model regresi terdistribusi normal atau mendekati normal (Santosa, 2002). Model regresi yang lolos uji normalitas dapat diidentifikasi dengan melihat persebaran data (titik) yang berada sekitar sumbu diagonal grafik. Jika persebaran data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka, model regresi memenuhi asumsi normalitas (Santosa, 2002).

3.5 .5 Analisis Regresi Linear Berganda

Kegunaan analisis regresi linear berganda adalah untuk mengukur pengaruh dua variabel independen/bebas atau lebih terhadap variabel dependen/terikat. Pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel ukuran organisasi, pernyataan standar akuntansi, dan tingkat manajemen lingkungan terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan pada pemerintah tingkat kabupaten/kota dan badan usaha milik daerah.

Model regresi penelitian ini adalah:

$$EAPI = \alpha_0 + \beta_1 \text{ SIZE} + \beta_2 \text{ ACC} + \beta_3 \text{ EMPI} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

α_0 : Tetapan

EAPI: Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan

β_1 : Koefisien regresi dari variabel SIZE

SIZE: Ukuran Organisasi

β_2 : Koefisien regresi dari variabel ACC

ACC: Pernyataan Standar Akuntansi

β_3 : Koefisien regresi dari variabel EMPI

EMPI: Manajemen Lingkungan

ε_i : Nilai Residu

3.5 .6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar kemampuan variabel-variabel dependen dalam mengungkapkan varians dari variabel terikat yang diteliti. Jika nilai koefisien determinasi mendekati angka satu, maka variabel independen memiliki pengaruh kuat dalam memengaruhi nilai variabel dependen.

3.5 .7 Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Maksud dari bersama-

sama adalah variabel independen akan diuji serentak terhadap variabel dependen. Di bawah ini adalah tahapan pengujian uji F:

a. Menentukan formulasi H_0 dan H_a

$H_0: b_i = 0$. Artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_1: b_i \neq 0$. Artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Menentukan F tabel dan F hitung

nilai signifikan F tabel yang dipilih adalah 5%.

nilai F hitung diperoleh dari hasil penghitungan SPSS.

c. Tes statistik

Jika $F \text{ tabel} > F \text{ hitung}$, maka semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh kuat terhadap variabel dependen.

Jika $F \text{ tabel} < F \text{ hitung}$, maka semua variabel independen mempunyai pengaruh kuat terhadap variabel dependen.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial berguna untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Maksud dari terpisah adalah variabel independen akan diuji satu persatu terhadap variabel dependen. Di bawah ini adalah tahapan pengujian uji t:

a. Menentukan formulasi H_0 dan H_a